

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

## **BAB III**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan salah satu kewajiban dari suatu organisasi/instansi pemerintah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan.

Didalam Laporan Kinerja Tahunan, pertanggungjawaban atas keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi tersebut antara lain meliputi pengukuran penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh, periodik dan terpadu. Selain digunakan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi pemerintah/SKPD, Laporan Kinerja Tahunan tersebut juga dapat digunakan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, sasaran dan tujuan organisasi yang merupakan bagian penting dari visi dan misi suatu organisasi/instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, didalam melakukan pengukuran dan evaluasi atas keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019, telah ditetapkan indikator kinerja utama yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

<b>85 s/d 100</b>	<b>: Sangat Berhasil</b>
<b><math>70 \leq X &lt; 85</math></b>	<b>: Berhasil</b>
<b><math>55 \leq X &lt; 70</math></b>	<b>: Cukup Berhasil</b>
<b><math>X &lt; 55</math></b>	<b>: Kurang Berhasil</b>

Diinformasikan pula bahwa penilaian yang diberikan tersebut merupakan hasil perbandingan antara target indikator kinerja dengan realisasi capaian yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, dan juga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, apakah telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

## **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa target kinerja yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar untuk tahun anggaran 2019 juga dituangkan didalam dokumen TAPKIN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Selain merupakan tolak ukur didalam melaksanakan program dan kegiatan, keberadaan dokumen TAPKIN yang disusun setiap tahunnya tersebut juga menegaskan kewajiban SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan inti/utama SKPD dengan kualitas yang optimal, dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, dokumen TAPKIN ini disusun dengan maksud sebagai dasar penilaian didalam pelaksanaan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja SKPD pada akhir tahun, agar dapat dilakukan perbandingan antara target kinerja yang telah dirumuskan dengan capaian kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang sama.

Pada tahun anggaran 2019 terdapat 3 (tiga) Program dan 19 (sembilan belas) kegiatan yang merupakan kegiatan utama dari SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai 1 (satu) sasaran strategi yang juga berkaitan dengan kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut memberikan kontribusi

pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dan termuat didalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 – 2023.

Capaian kinerja yang telah diraih sebagai hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat pada tahun anggaran 2019 tersebut selanjutnya akan di sajikan per sasaran strategis. Langkah ini ditempuh sesuai dengan amanat peraturan dan kebijakan yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja.

Adapun hasil pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan pada analisis berikut ini :

### **Sasaran :**

“Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil”

Sasaran ini ditetapkan guna mendukung misi “Mewujudkan Masyarakat yang Tertib” dengan kebijakan yang ditempuh yaitu :

1. Meningkatkan edukasi Pancasila dan cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat;
2. Meningkatkan koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial;
3. Meningkatkan peran pemuda dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan;
4. Meningkatkan pendidikan politik dan fasilitasi politik bagi masyarakat ORMAS, OKP, dan partai politik.

Capaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kebebasan Sipil

### **1) PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019**

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019, khusus untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel III.1**  
Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	97,35 %	93,75%	96,30
<b>Nilai Capaian Kinerja Sasaran</b>					<b>96,30</b>

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Indeks Kebebasan Sipil adalah sangat berhasil.

**a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Didalam upaya pencapaian sasaran ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar telah melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat secara cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dengan dimanfaatkannya fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan kantor dalam upaya merealisasikan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Selain itu, pemanfaatan sumber daya aparatur yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat juga dipandang telah cukup efisien, dan disesuaikan dengan volume beban kerja yang harus diselesaikan agar memperoleh hasil yang optimal, sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat melibatkan dinas/instans terkait di Provinsi Kalimantan Barat.

**b. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam upaya merealisasikan sasaran ini, pada tahun anggaran 2019 telah ditetapkan untuk melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu : Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan

AGHT. Didalam program – program ini termuat kegiatan yang ditetapkan dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut akan dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil. Kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Posko dan Pemantauan/Supervisi Pilpres dan Pileg Tahun 2019.**

Kegiatan Posko dan Pemantauan/Supervisi Pilpres dan Pileg Tahun 2019 ini dilaksanakan untuk menggambarkan situasi dan perkembangan politik dan keamanan serta ketertiban/ketentraman dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif serentak di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.

**2. Sosialisasi Budaya Politik Santun.**

Kegiatan Sosialisasi Budaya Politik Santun ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Terlaksananya Sosialisasi Budaya Politik Santun dalam mengembangkan kehidupan politik yang demokratis.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan generasi muda mengenai etika berpolitik dalam mengembangkan kehidupan politik yang demokratis.
3. Meningkatnya pemahaman generasi muda akan budaya politik santun.
4. Terciptanya koordinasi tentang pelaksanaan Budaya Politik Santun.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019 di Kabupaten Bengkayang. Sasaran dari kegiatan tersebut adalah pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Kabupaten Bengkayang. Dengan jumlah peserta yang hadir berjumlah 200 orang dari berbagai unsur tersebut.

### **3. Fasilitasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.**

Kegiatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mempunyai maksud yaitu sebagai mitra dalam pengembangan dan pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia dan upaya diseminasi Indeks Demokrasi Indonesia. Dan tujuannya adalah :

1. Upaya diseminasi Indeks Demokrasi Indonesia.
2. Melakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan data dan kualitas data yang akan dihasilkan.
3. Melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik ditingkat Provinsi Kalimantan Barat.
4. Berguna bagi pemerintah daerah provinsi dan masyarakat untuk mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2019 di Kota Pontianak, dengan peserta berasal dari anggota dan sekretariat kelompok kerja IDI (Pokja IDI) Provinsi Kalimantan Barat, unsur Kesbangpol se Kalimantan Barat, unsur OPD terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, ormas, mahasiswa dan LSM

### **4. Koordinasi Penyelenggaraan administrasi Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2019.**

Kegiatan koordinasi penyelenggaraan administrasi bantuan partai politik ini dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Agar dana yang berasal dari Negara digunakan untuk pendidikan politik dan kaderisasi di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Agar penggunaan dana bantuan partai politik dilaksanakan secara transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik, karena sebagai institusi publik, partai

politik mempunyai peran besar dalam menjaga demokrasi dan pengelolaan pemerintahan.

Sebagaimana di amanatkan dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, persoalan transparansi dan akuntabilitas atas pendanaan partai politik masih menjadi tantangan hingga saat ini. Harapan publik untuk dapat mengakses dokumen laporan keuangan masih sulit dijamin. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik sangat diperlukan karena partai politik mempunyai peran besar dalam menjaga demokrasi dan pengelolaan pemerintahan. Namun komitmen partai politik untuk membuka dan mempertanggungjawabkan dana partai sangat lemah. Secara khusus fenomena pelaporan keuangan yang kurang baik itu sekaligus memperlihatkan bahwa partai politik tidak disiplin dalam mencatat penerimaan, pengelolaan dan pengeluaran dana partainya

#### **5. Pembinaan Kepada Partai Politik.**

Kegiatan Pembinaan Kepada Partai Politik ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan atas penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan partai politik terkait dengan mekanisme pengajuan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, hal ini sangat diperlukan mengingat pemahaman partai politik terhadap pelaporan keuangan, baik bantuan dari Pemerintah, iuran dari anggota maupun sumbangan dari pihak swasta yang sah, belum dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan dan peraturan. Oleh karena itu kiranya kegiatan pembinaan kepada partai politik disarankan untuk dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan

khususnya kepada mereka yang mengelola keuangan partai politik dalam rangka menghindari temuan atas pemeriksaan oleh BPK.

**6. Peningkatan Kesadaran Bela Negara.**

Kegiatan Kesadaran Bela Negara ini dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran umum tentang bela Negara di kalangan generasi muda Kalimantan Barat;
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya potensi yang dimiliki oleh generasi muda untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Memberikan tambahan pengetahuan tentang pentingnya sinergitas diantara seluruh komponen bangsa dalam mengupayakan tumbuh kembangnya kesadaran tentang bela Negara.

**7. Rapat Kerja Teknis Pengembangan Wawasan Kebangsaan.**

Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengembangan Wawasan Kebangsaan se-Kalimantan Barat mempunyai maksud untuk mengintensifkan komunikasi timbal balik antara jajaran Instansi Pemerintah Daerah yang menangani pelaksanaan tugas Kesbangpol baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun tujuannya diharapkan muncul kesepahaman, kesatuan cara pandang, bahasa, gerak untuk mewujudkan tanggung jawab bersama dalam pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, serta terwujudnya hubungan kerja yang harmonis dan sinergis antara Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kabupaten/kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Peserta Rapat Kerja Teknis Pengembangan Wawasan Kebangsaan se-Kalimantan Barat ini berjumlah 30 ( tiga puluh) orang yang terdiri dari Kepala Badan/Kantor/Bagian Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan seluruh pejabat



struktural di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Dari seluruh proses penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis Pengembangan Wawasan Kebangsaan se-Kalimantan Barat di Provinsi Kalimantan Barat ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalbar belum semuanya terbentuk, sampai saat ini Kabupaten/Kota yang sudah membentuk PPWK adalah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Tersosialisasikannya Keberadaan Kanwil Kemenhan di Pontianak kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

#### **8. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.**

Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila ini dilaksanakan di Kabupaten Sanggau pada tanggal 27 Agustus 2019. Peserta yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah pelajar, pramuka dan pemuda yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau berjumlah 100 orang.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila ini yaitu :

1. Menjadikan sumber daya manusia Indonesia yang berwawasan Pancasila, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotism.
2. Memberikan arah kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan dan fasilitasi dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para penyelenggara Negara dan pemerintah di tingkat daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga pendidikan.
3. Menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada pelajar, pramuka dan pemuda.

Tema dari kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Kabupaten Sanggau ini adalah “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Upaya Membudayakan Kembali Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa, Pandangan Hidup dan Filsafat Hidup NKRI”. Dengan narasumber yang berasal dari unsur TNI, POLRI, Pemerintah Kabupaten Sanggau dan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

#### **9. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan.**

Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 1 Agustus 2019. Adapun maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini sebagai berikut :

1. Menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dikalangan generasi muda.
2. Memberikan tambahan pengetahuan kepada generasi muda tentang konsep wawasan kebangsaan.
3. Memberikan gambaran kepada peserta tentang pentingnya rasa cinta tanah air dan nasionalisme untuk membentuk karakter bangsa.

Adapun narasumber yang memaparkan materi pada kegiatan ini berasal dari unsur TNI, Polri, Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Peserta yang menjadi target dari kegiatan ini adalah unsur pelajar dan pemuda dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang berjumlah 85 orang.

#### **10. Rakor Forum Pembauran Kebangsaan.**

Rakor Forum Pembauran Kebangsaan ini dilaksanakan dengan maksud melakukan rapat antara pengurus FPK dalam upaya meningkatkan toleransi dan pembauran kebangsaan. Dengan tujuan sebagai berikut :

1. Melakukan dialog dengan pengurus FPK di tingkat provinsi yang berhubungan dengan pembauran kebangsaan.
2. Menampung aspirasi anggota FPK dan aspirasi masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan di bidang pembauran kebangsaan.
4. Mendorong pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan agar lebih mengoptimalkan perannya dalam pembangunan, memelihara ketentraman masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa.
5. Mengkoordinasikan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat.

Rakor ini dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2019, peserta yang hadir 43 orang, yang terdiri dari 8 orang Tim Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan dan 35 orang pengurus dan anggota Forum Pembauran Kebangsaan.

#### **11. Pemutakhiran Data Ormas se Kalimantan Barat.**

Kegiatan pemutakhiran data ormas se Kalimantan Barat ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan data ormas yang akurat se Kalimantan Barat. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah berupa Buku Direktori Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019. Dengan disusunnya buku Direktori ini adalah sebagai pedoman data Ormas / LSM yang berada di Provinsi Kalimantan Barat yang bertujuan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta perlu dilakukan Pemutakhiran Data Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019. Buku ini merupakan manifestasi konsep ideal terhadap organisasi agar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat Memonitoring setiap langkah Ormas dan LSM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi komponen struktur organisasinya tetap terarah dan

berada dalam koridor aturan main organisasi, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang diberlakukan di NKRI.

## **12. Pemantauan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama di Prov. Kalimantan Barat.**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan tersedianya laporan hasil pemantauan kegiatan Kerukunan Umat Beragama sebagai tolak ukur (evaluasi) perkembangan dan peran FKUB. Hal ini sangat diperlukan mengingat sering terjadi gesekan dan konflik antar umat beragama. Masyarakat begitu mudah tersulut terhadap isu yang berbaur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Pemerintah Daerah maupun Kementerian Agama perlu meningkatkan kualitas kerukunan hidup umat beragama melalui pembinaan, sehingga sejak dini dapat diprediksi adanya potensi konflik di masyarakat, perlu adanya peningkatan peran dan kinerja FKUB di Kalimantan Barat, baik dalam aspek kelembagaan, jaringan, program, pendanaan serta pemberdayaan masyarakat, ide pluralisme dan multikulturalisme juga perlu dipahami sebagai pemahaman untuk mengatasi persoalan ini.

## **13. Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat.**

Maksud dilaksanakannya kegiatan Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat ini adalah :

- a. Meningkatkan peran dan fungsi FKUB dalam hal deteksi dini, pencegahan dan meredam potensi konflik di daerah.
- b. Mendorong pengurus FKUB untuk berperan aktif dalam menciptakan suasana rukun dan damai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menjaga dan memelihara toleransi antar umat beragama dan kelompok masyarakat serta mendukung suksesnya pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan PILKADA Tahun 2020.

Adapun tujuannya yaitu :

1. Untuk menyamakan persepsi anggota FKUB provinsi maupun FKUB kabupaten/kota dalam rangka menjaga dan memelihara toleransi antar umat beragama dan kelompok masyarakat yaitu melakukan pembinaan, penyampaian, dan penyeruan nilai-nilai agama sesuai ajaran agama masing-masing.
2. Untuk mempererat silaturahmi antara Pemerintah, FKUB dan masyarakat utamanya, karena peran serta para tokoh agama sangat strategis dalam menciptakan kesejukan dan kedamaian di tengah masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 18 s/d 19 September 2019 dengan peserta yang mengikuti berjumlah 70 orang, terdiri dari unsur FKUB Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 21 orang, unsur FKUB Kabupaten/Kota sebanyak 28 orang, unsur Kesbangpol Kabupaten/Kota sebanyak 14 orang dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 5 orang.

#### **14. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dikabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.**

Maksud dan tujuan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama adalah :

1. Meningkatkan intensitas komunikasi, jalinan kemitraan, dan fasilitasi antara pemerintah daerah dengan tokoh agama dan ormas keagamaan dalam rangka mengantisipasi munculnya permasalahan yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama di daerah.
2. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundangan terkait secara intensif, menyeluruh, dan mengoptimalkan berbagai saluran media sosialisasi yang tersedia.
3. Meningkatkan peran FKUB dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama di daerah, bersama-sama dengan ormas keagamaan.

4. Membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama serta terjalinnya toleransi dalam umat beragama dan antar umat beragama melalui Pembinaan dan Peran FKUB dapat terus terjaga

Kegiatan ini dilaksanakan di 3 (tiga) kabupaten, yakni Kabupaten Ketapang pada tanggal 21 Maret 2019, Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 2 Juli 2019 dan Kabupaten Sambas pada tanggal 7 Agustus 2019.

Sasaran dari kegiatan ini yaitu pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) agar dapat meningkatkan silaturahmi antar tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat beragama di Kabupaten Sambas serta dapat menumbuhkan pemahaman bahwa keberagaman yang ada adalah merupakan sebuah aset dan bukan sebagai sebuah masalah. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 80 orang peserta dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Anggota FKUB di masing-masing kabupaten tersebut diatas.

#### **15. Fasilitasi dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini di Daerah.**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) maupun antar FKDM dengan Pemerintah Daerah terutama dalam pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini dalam rangka ikut serta menciptakan dan memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah di wilayahnya masing-masing. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan agar dapat menjangkau, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, keamanan dan gejala atau peristiwa lainnya di wilayah masing-masing dalam upaya mewujudkan situasi dan kondisi daerah yang kondusif.

**16. Pemantauan Penanganan Masalah Kebangsaan dan Politik.**

Kegiatan Pemantauan Penanganan Masalah Kesatuan Bangsa dan Politik ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memonitor isu-isu yang menonjol dan perkembangan situasi kesatuan bangsa dan politik di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif di Kalimantan Barat.

Adapun dalam mewujudkan kegiatan tersebut telah dilaksanakan pertemuan antar pejabat dari dinas/instansi terkait di lingkup provinsi maupun dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

**17. Pengembangan Multikulturalisme pada Pelajar SMU sederajat.**

Kegiatan Pengembangan Multikulturalisme ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan gambaran umum tentang stereotip dan prasangka dalam kehidupan sosial sehari-hari, memberikan pengetahuan dan gambaran yang nyata tentang perbedaan dan persamaan termasuk di dalamnya hal-hal positif yang dimiliki oleh suku bangsa-suku bangsa yang ada di Provinsi Kalimantan Barat serta menumbuhkembangkan sikap toleransi dalam kehidupan sosial yang didasarkan pada pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman asasi yang ada. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah para pelajar SMU

**18. Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat.**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung upaya pemeliharaan ketertiban dan rasa aman masyarakat serta menjaga stabilitas daerah. Sasaran yang ingin dicapai ialah terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, konsultasi dalam

penanganan konflik sosial di daerah dengan melakukan pertemuan, rapat, maupun monitoring bersama dengan instansi vertikal, Dinas/Badan dilingkup pemerintah daerah, maupun koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

Guna mengefektifkan masing-masing Instansi vertikal di daerah, Provinsi Kalimantan Barat, maka melalui Keputusan Gubernur Nomor : 220/KESBANGPOL/2018 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 252/KESBANGPOL/2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 757/KESBANGPOL/2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat, begitu pula untuk tingkat Kabupaten/Kota telah dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

**19. Penyusunan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Prekursor.**

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam rangka melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psikotropika zat adiktif dan prekursor di wilayah provinsi kalimantan barat.

**2) PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2019, 2018 DAN 2017)**

Secara ringkas, perbandingan sasaran dan indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel III.2**

Perbandingan Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun-tahun Sebelumnya (Tahun 2017 dan 2018)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja		
			Tahun 2019	Tahun-tahun Sebelumnya	
				2018	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil	Indeks kebebasan sipil.	93,75%	-	-

**3) PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH**

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan target kinerja jangka menengah dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel III.3**

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2020
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil	Indeks kebebasan sipil.	-	-	93,75%	97,95%

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran strategis ini sudah optimal, dengan skala ordinal pengukuran pencapaian sasaran predikat sangat berhasil.

**4) ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil adalah sangat berhasil.

Didalam upaya pencapaiannya, secara umum tidak ditemui kendala dan permasalahan yang berarti, kecuali penyempurnaan anggaran yang membuat tidak terlaksananya pemantauan secara maksimal.

## B. REALISASI ANGGARAN

Ketersediaan anggaran yang memadai untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan merupakan salah satu faktor pendukung utama pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, khusus untuk program dan kegiatan yang bersifat prioritas OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar, pada tahun anggaran 2019 telah ditetapkan untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 19 kegiatan.

Adapun rincian pagu anggaran per program, beserta realisasi penyerapannya secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III. 4**  
Pagu Anggaran dan Realisasi/Penyerapan Anggaran  
Program dan Kegiatan prioritas/inti  
Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	646.045.900	598.486.900	92,64
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	411.826.400	400.097.300	97,15
3.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan)	1.318.552.900	1.159.844.300	87,96
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>2.376.425.200</b>	<b>2.158.428.500</b>	<b>90,83</b>